



## Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Upaya Meningkatkan Akses Kesehatan Masyarakat di Indonesia

Eva Nur Agustin<sup>1</sup>, Jahira Fajri Madani<sup>2</sup>, Kazhima Alma Azzahra<sup>3</sup>, Novita Dwi Istanti<sup>4</sup>

Fakultas Ilmu Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Universitas Pembangunan Nasional  
"Veteran" Jakarta

[2010713028@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2010713028@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2010713107@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2010713107@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2010713155@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2010713155@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Menurut UU No. 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan kesehatan, baik secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk menjalani kehidupan yang produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk menjamin kesehatan tersebut, pemerintah membentuk jaminan kesehatan yang dikenal dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam pelaksanaannya, program JKN mengalami beberapa tantangan dan kendala. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program JKN dalam hal peningkatan akses kesehatan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka yang diperoleh dari delapan jurnal database online *Google Scholar* antara tahun 2018 hingga 2023. Berdasarkan data BPJS Kesehatan per Oktober 2022, sebanyak 89,35% dari seluruh penduduk Indonesia telah dijamin pembiayaan kesehatan melalui program JKN. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program JKN, yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk mengatasinya, diperlukan berbagai strategi untuk mengoptimalkan program JKN di Indonesia. Selain itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan dan implementasi digitalisasi pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan diperlukan sebagai kesiapan menghadapi dunia global. Dalam pelaksanaannya, JKN masih mengalami berbagai kendala seperti kesiapan dan daya tanggap stakeholder yang rendah, sarana dan prasarana yang belum maksimal, serta regulasi mengenai program JKN belum tersedia dan disosialisasikan dengan baik.

**Kata Kunci :** Akses Kesehatan Masyarakat, Evaluasi, Jaminan Kesehatan Nasional

### ABSTRACT

*According to Law No. 36 of 2009, health is a state of health, both physically, mentally, spiritually and socially that allows everyone to lead a socially and economically productive life. To ensure this health, the government established a health insurance known as the National Health Insurance (JKN). In its implementation, the JKN program experienced several challenges and obstacles. Therefore, this study aims to evaluate the JKN program in terms of increasing public health access. The research method used was a literature review obtained from eight journals from the Google Scholar online database between 2018 and 2023. Based on BPJS Kesehatan data as of October*

Received April 25, 2023; Revised Mei 12, 2023; Accepted Juni 06, 2023

\* **Jahira Fajri Madani**, [2010713107@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2010713107@mahasiswa.upnvj.ac.id)

## ***Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Upaya Meningkatkan Akses Kesehatan Masyarakat di Indonesia***

*2022, as many as 89.35% of the entire Indonesian population has been guaranteed health financing through the JKN program. There are several factors that affect the implementation of the JKN program, namely internal and external factors. To overcome this, various strategies are needed to optimize the JKN program in Indonesia. In addition, collaboration between stakeholders and the implementation of digitalization of health services in various health care facilities are also needed as readiness to face the global world. In its implementation, the implementation of JKN still experiences various obstacles such as low stakeholder readiness and responsiveness, facilities and infrastructure that have not been maximized, and regulations regarding the JKN program have not been available and socialized properly.*

**Keywords :** *Public Health Access, Evaluation, National Health Insurance*

### **PENDAHULUAN**

Menurut UU No. 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan keadaaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian, untuk menjamin kesehatan tersebut, pemerintah membentuk sebuah jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia yang diwujudkan dalam sebuah jaminan sosial nasional. Sistem jaminan sosial nasional ini menurut UU No. 40 Tahun 2004 terdiri dari beberapa kategori, seperti misalnya jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Salah satu jaminan sosial nasional yaitu jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional dengan mengacu pada prinsip asuransi sosial dan ekuitas.

Dalam pelaksanaannya Jaminan Kesehatan Nasional yang dimulai sejak 2014 telah memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, beriringan dengan pelaksanaannya juga masih banyak tantangan dan hambatan untuk memperluas cakupan JKN. Menurut Laporan Hasil Penelitian Evaluasi Kebijakan JKN di 13 Provinsi Indonesia dalam (Candra *et al.*, 2020), hingga akhir 2019 capaian kepesertaan JKN nasional baru mencapai 83,6% dan jauh lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Hambatan yang terjadi dalam kewajiban kepesertaan dan regulasi pendaftaran menyebutkan hal ini dapat memperberat peserta mandiri, terutama yang latar belakang ekonomi rendah atau tidak stabil. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan program JKN belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jika masih terdapat banyak hambatan yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, penggunaan pelayanan kesehatan harus dapat memberikan kemudahan akses dan pelayanan kesehatan yang

optimal bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya, regulasi, dan hubungan antar *stakeholder* yang terkait.

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui jaminan sosial. Jaminan sosial ini merupakan bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara, yang berguna untuk menjamin masyarakat atau masyarakat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (Solechan, 2019). Jaminan Sosial ini berawal dari Jamkesmas, Jamkesda, Askes dan ada program pemerintah baru yang disebut Administrasi Jamsostek. Selama pelaksanaan JKN Dikelola oleh BPJS Kesehatan terpusat, jadi ketika itu terjadi Pembatasan di bawah manajemen cabang Anggota parlemen di wilayah tersebut sudah terlambat untuk berbicara. Yang terburuk adalah kurangnya regulasi Masyarakat, seperti dalam Instruksi Presiden 2017 untuk optimalisasi Pelaksanaan program jaminan kesehatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjelaskan peran pemerintah daerah untuk yang kurang beruntung terbatas pada biaya partisipasi saja JKN-KIS dalam anggaran pendapatan dan Publikasi Daerah (APBD).

## METODE

Dalam menyusun penelitian ini digunakan metode *Literatur review* yaitu dengan mengumpulkan dan mengolah data penelitian yang telah ada sebelumnya dengan rentang tahun 2019–2023. *Literatur* dicari menggunakan mesin pencarian *Google Scholar* serta basis data jurnal, seperti Researchgate. Penelusuran literatur menggunakan kata kunci yaitu Evaluasi Pelaksanaan Program JKN, dan upaya peningkatan akses Kesehatan Masyarakat. Kriteria inklusi yang digunakan antara lain artikel mendiskusikan tentang evaluasi pelaksanaan program JKN. Kriteria eksklusi yang digunakan antara lain artikel tidak menggunakan Bahasa Indonesia, artikel yang terbit sebelum tahun 2019, artikel yang tidak lengkap, dan artikel tidak sesuai dengan kriteria. Berdasarkan hasil penyaringan kriteria inklusi dan eksklusi dihasilkan artikel yang akan dijadikan bahan acuan yakni sebanyak 8 artikel.

## HASIL

---

No	Penulis/Tahun	Judul	Metode	Hasil
----	---------------	-------	--------	-------

---

***Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Upaya Meningkatkan Akses Kesehatan Masyarakat di Indonesia***

1	Santoso Nindiya Ayu (2022)	Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Indonesia	<i>literature review.</i>	Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa selama keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia masih menghadapi berbagai macam permasalahan. Permasalahan yang dihadapi diantaranya yaitu berkaitan dengan regulasi, obat-obatan, rendahnya sosialisasi, tersendatnya biaya kalin rumah sakit, terjadinya defisit anggaran, lambatnya penanganan pasien, mengalami kondisi financial distress.
2	Sundoro Totok, et al (2023)	Peningkatan Pemahaman Masyarakat melalui Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional	Ceramah dan tanya jawab	Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan membawa dampak yang cukup positif bagi masyarakat Kelurahan Wonolelo Pleret Bantul. Masyarakat telah mendapatkan pengetahuan dan informasi yang baik sehingga termotivasi dan yakin bahwa Program JKN ini penting, dimana masyarakat yang saat ini belum memiliki jaminan kesehatan berencana untuk mendaftarkan diri untuk menjadi Peserta JKN (Status Peserta Mandiri) melalui aplikasi Mobile JKN atau rencana datang langsung ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat. Bagi Warga dengan kriteria tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan dapat segera didata kembali oleh Kelurahan Wonolelo dan

---

				dilaporkan Kepada Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk dapat direkomendasikan dan didaftarkan sebagai Peserta JKN PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari dana APBD (Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Bantul atau dimasukkan sebagai peserta sementara Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) Kabupaten Bantul.
3	Qomaruddin mohammad bagus, <i>et al</i> (2022)	Pemberdayaan Masyarakat Pada Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Perspektif Kader Kesehatan Di Indonesia	Pendekatan <i>cross-sectional</i>	Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman kader tentang JKN dalam kategori baik, tokoh masyarakat maupun bidan tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) masih berada pada kategori cukup. Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan pada era JKN ini masih tetap dianggap penting. Salah satu variabel penelitian yang secara signifikan memiliki hubungan adalah lama kerja, namun hubungan bersifat negatif. lama kerja berhubungan dengan pemahaman tentang JKN dengan penilaian tentang pentingnya program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam era JKN. Artinya bahwa semakin lama bekerja menilai bahwa program pemberdayaan tidak penting.

---

***Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Upaya Meningkatkan Akses Kesehatan Masyarakat di Indonesia***

4	Suryani Syifa Aulia (2022)	Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Medan	literature review	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada 1 Desember 2022, Kota Medan telah meraih predikat UHC (Universal health coverage). Meskipun telah meraih predikat tersebut, Pemerintah Kota Medan tetap perlu untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini karena masih ditemukan adanya fasilitas kesehatan yang belum memadai. Selain itu, ditemukan juga perbedaan kepuasan antara pasien BPJS dengan pasien umum.
5	Sinaga Evi Susanti <i>et al.</i> (2021)	Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi DKI Jakarta, Indonesia	<i>Mix methods</i>	Hasil dari penelitian ini disebutkan bahwa Masih terdapat peserta JKN yang tidak aktif/menunggak yang berasal dari peserta segmen pekerja penerima upah pemerintah dan swasta. Fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan sudah memenuhi standar, namun terkait paket manfaat layanan jantung, ketersediaan dokter spesialis jantung dan fasilitas cath lab belum merata khususnya di Kepulauan Seribu. Preferensi pasien dalam memilih layanan kesehatan yang diinginkan mengakibatkan implementasi sistem rujukan berjenjang dan rujuk balik masih mengalami kendala di fasilitas kesehatan.

6	(Pertwi <i>et al.</i> , 2023)	Efektivitas Pelaksanaan Program JKN di Klinik Adisma Husada Kota Medan	Deskriptif kualitatif	Pemanfaatan BPJS di Klinik Adisma Husada untuk meningkatkan efektivitas sudah berjalan sesuai program BPJS namun masih adanya kendala dimana pasien yang datang masih belum memiliki mobile JKN yang mengakibatkan terjadinya antrian sangat panjang dan menumpuk. Selain itu, belum ada pihak BPJS turun kelapangan mengadakan sosialisasi terkait mobile JKN ini sehingga mengakibatkan peserta kurang paham akan pengaplikasiannya
7	(Nisnoni, 2020)	Evaluasi Proses Implementasi Kebijakan Program UHC (Universal Health Coverage) di Semarang	Kualitatif	Kebijakan Program UHC (Universal Health Coverage) di Semarang telah memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat sebagai solusi meringankan masalah kesehatan di Kota Semarang dalam kaitannya dengan kepesertaan jaminan kesehatan bagi warga yang belum dan tidak mampu untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Meskipun secara keseluruhan program telah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan dalam aspek komunikasi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyadari program ini memang di targetkan benar-benar untuk masyarakat yang tidak mampu dan belum menerima jaminan kesehatan.

***Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Upaya Meningkatkan Akses Kesehatan Masyarakat di Indonesia***

8	(Rosidah Patimah, 2019)	Upaya BPJS Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan Promotif dan Preventif di Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara	Deskriptif kualitatif	Pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan BPJS-Kesehatan bersama lembaga kesehatan terkait dapat dikatakan belum mencapai hasil yang memuaskan, dan informasi yang didapat masyarakat masih sedikit. Selain itu, alternatif lain untuk penyampaian informasi secara tidak langsung kepada masyarakat masih kurang optimal. Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan pelayanan sesuai dengan program Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi
---	-------------------------	--	-----------------------	---

**PEMBAHASAN**

**Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia**

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap orang dan setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan, termasuk masyarakat miskin. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk hidup sehat dan berhak atas pelayanan kesehatan, dan dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk berusaha mewujudkan kesehatan yang sebaik-baiknya bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Badan penyelenggara jaminan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan, implementasinya telah dimulai sejak 1 Januari 2014. Program tersebut selanjutnya disebut sebagai program jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Para pelaksana terutama yang terlibat dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan masih belum begitu memahami pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terkait dengan tugas dan kegiatan yang dilakukannya, hal ini terlihat dari masih kurangnya pemahaman warga negara

terhadap program jaminan kesehatan nasional itu sendiri. Kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat. Masalah kesehatan masyarakat mempengaruhi pembangunan negara dan menimbulkan kerugian di bidang ekonomi. Kesehatan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, karena kesehatan merupakan sumber daya bagi kesejahteraan fisik, mental dan sosial setiap individu. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga dinilai mengalami financial distress. Financial Distress merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami kegagalan dalam menjalankan operasional perusahaan untuk memperoleh laba (Harahap et al. 2020). Financial Distress kerap dikonotasikan sebagai kegagalan ekonomi yang menggambarkan perusahaan kehilangan sejumlah uang sehingga tak mampu menutup biaya yang harus dikeluarkan dimana digambarkan bahwa arus kas perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan kewajibannya (Adnan dan Kurniasih, 2000).

### **Pelaksanaan dan Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

Berdasarkan data BPJS Kesehatan per Oktober 2022 sebanyak 246,46 juta jiwa atau sekitar 89,35% dari seluruh penduduk Indonesia telah terjamin pembiayaannya melalui program JKN, hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti dalam (BPJS Kesehatan, 2022). Cakupan kepesertaan program JKN telah termasuk dari penduduk miskin dan tidak mampu, pensiunan ASN/TNI/POLRI, dan sebagainya. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersifat wajib kepada seluruh warga negara Indonesia sebagai peserta, guna membangun kebersamaan antar peserta melalui prinsip gotong royong dalam menanggung beban biaya jaminan sosial. Dalam pelaksanaan dari program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, maka tentu mengharapkan adanya hasil yang dapat membantu seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Dalam tahapan pelaksanaan program JKN terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dari program atau kebijakan tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor pendukung maupun penghambat. Selain itu, ada pula faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program JKN. Pada faktor internal ada beberapa aspek yang menjadi mendukung program JKN, seperti: 1) adanya dana APBD untuk mendukung pelaksanaan JKN dan 2) adanya komitmen petugas kesehatan. Lalu faktor internal yang menjadi penghambat, seperti: 1) kurangnya sosialisasi terkait regulasi BPJS Kesehatan, 2) tunggakan atau keterlambatan pembayaran pihak BPJS Kesehatan, 3) terbatasnya sarana dan prasarana, 4) keterbatasan SDM

## ***Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Upaya Meningkatkan Akses Kesehatan Masyarakat di Indonesia***

Kesehatan. Selanjutnya pada faktor eksternal ada beberapa aspek yang dapat menjadi peluang program JKN, seperti: 1) adanya dukungan dan kerjasama dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan DPRD, 2) diterapkannya sistem rujukan yang berjenjang dari FKTP ke FKTL, 3) adanya kebutuhan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat yang cukup tinggi, 4) meningkatnya jumlah keanggotaan BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun. Faktor eksternal yang dapat menjadi ancaman bagi pelaksanaan program JKN, seperti: 1) dampak dari tunggakan pembayaran JKN atau BPJS Kesehatan, 2) klaim tagihan penyakit pasien BPJS yang tidak *tercover*, 3) rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan program JKN.

Dengan adanya berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat menjadi pendukung ataupun penghambat program JKN, harus dilakukan bermacam upaya atau strategi untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan program JKN di Indonesia. Strategi atau upaya tersebut dilakukan oleh pemangku kebijakan juga harus sejalan dengan para pelaksana program di FKTP dan FKTL. Strategis umum yang dapat rutin dilakukan antara lain melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi secara berkala mengenai program JKN, meningkatkan sarana dan prasarana di FKTP dan FKTL, serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait program JKN guna meningkatkan pemahaman masyarakat.

### **Upaya Peningkatan Akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan Berkolaborasi antar Stakeholder**

Dalam dunia yang semakin global, terdapat berbagai dinamika perubahan dan tantangan yang harus dihadapi bagi peningkatan kualitas layanan dan program dari JKN itu sendiri. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan kolaborasi antar stakeholder dan penerapan digitalisasi layanan kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya kolaborasi antar stakeholder ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan inovasi yang berbasis digital. Selain itu, penerapan dari adanya digitalisasi dalam pelayanan kesehatan ini bisa menjadi nilai tambah bagi fasilitas pelayanan kesehatan maupun program JKN seperti BPJS di Indonesia.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dari 500 RS, terdapat sekitar 8% yang belum menerapkan teknologi informasi dan sebanyak 12% dari 500 RS sudah memiliki rekam medis elektronik. Selain dari diperlukannya digitalisasi dalam pelayanan kesehatan, diperlukan juga literasi mengenai program JKN kepada masyarakat baik mengenai rincian programnya maupun inovasi pelayanan JKN yang kini sudah

banyak yang berbasis *online* (Sanur, 2022). Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pertiwi *et al.*, 2023) yang mana dalam hasil penelitiannya mengenai pelaksanaan BPJS di Klinik Adisma Husada, Kota Medan masih mengalami kendala berupa kurangnya pemahaman mengenai aplikasi JKN *online* sehingga bisa menurunkan produktivitas layanan rumah sakit.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan maka disimpulkan bahwa evaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia telah berjalan dengan cukup baik pada beberapa daerah. Pada awal diterapkannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pelaksanaannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, secara umum di tingkat kualitas pelayanan untuk menunjang kebutuhan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Meskipun pada pelaksanaannya terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi, seperti masih rendahnya kesiapan dan ketanggapan *stakeholder*, sarana prasarana belum maksimal, serta aturan-aturan mengenai program JKN belum tersedia dan tersosialisasi dengan baik. Akan tetapi, perbaikan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan program JKN harus terus dilakukan dengan cara meningkatkan kerjasama oleh berbagai pihak secara luas untuk memperoleh masukan dan hasil perbaikan program JKN sehingga kedepannya dapat mencapai Universal Health Coverage dan peningkatan akses kesehatan masyarakat di Indonesia.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa sumber jurnal yang ada, penulis memberikan saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan perbaikan atau penelitian selanjutnya. Adapun saran yang dapat peneliti berikan pada kesempatan ini, yaitu:

1. Sebaiknya pada peneliti selanjutnya dapat memperdalam pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Jika memungkinkan peneliti selanjutnya sebaiknya dapat lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penulisan artikel ini, diantaranya kepada tim dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat Program

***Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Upaya Meningkatkan Akses Kesehatan Masyarakat di Indonesia***

Sarjana UPN “Veteran” Jakarta mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Kesehatan, rekan kelompok, dan seluruh pihak yang telah memfasilitasi penulisan artikel ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- BPJS Kesehatan (2022) *Layanan Kesehatan JKN, Mutu, dan Pemerataan Akses Fasilitas Kesehatan jadi Tantangan*, [bpjs-kesehatan.go.id](https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2450/Layanan-Kesehatan-JKN-Mutu-dan-Pemerataan-Akses-Fasilitas-Kesehatan-jadi-Tantangan). Available at: <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2450/Layanan-Kesehatan-JKN-Mutu-dan-Pemerataan-Akses-Fasilitas-Kesehatan-jadi-Tantangan> (Accessed: 25 March 2023).
- Candra et al. (2020) ‘Laporan Hasil Penelitian Evaluasi Kebijakan JKN di 13 Provinsi Indonesia’, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada, p. 97.
- Nisoni, D. (2020). Evaluasi Proses Implementasi Kebijakan Program UHC (Universal Health Coverage) di Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 1(1), 1–15.
- Patimah, R. (2019) ‘Upaya Bpjs-Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan Promotif Dan Preventif Di Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara’, *e Journal Ilmu Pengetahuan*, 7(3), pp. 1155–1168.
- Pertiwi, C., Rifdah, A. A., Kartika, P., & Gurning, F. P. (2023). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Efektivitas Pelaksanaan Program JKN di Klinik Adisma Husada Kota Medan*. 2(1), 24–29.
- Santoso, N. A. (2022). *Evaluasi program jaminan kesehatan nasional di indonesia*. December. [https://www.researchgate.net/publication/366594818\\_Evaluasi\\_ProgramJaminan\\_Kesehatan\\_Nasional\\_Di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/366594818_Evaluasi_ProgramJaminan_Kesehatan_Nasional_Di_Indonesia)
- Sanur. (2022). *Kolaborasi dan Digitalisasi Kunci Sukses Layanan JKN*. <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2445/Kolaborasi-dan-Digitalisasi-Kunci-Sukses-Layanan-JKN>
- Suryani, S. A. (2022). *EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL ( JKN ) EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL ( JKN ) DI KOTA MEDAN EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF JAMINAN KESEHATAN*. December.
- Jkn, N., Pesepektif, D., & Kesehatan, K. (2022). *Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ( STIKes ) Cirebon*. 13(2), 50–58. <https://doi.org/10.38165/jk.v13i1.272>
- Totok Sundoro, Nida Tsaqila, F. U. N. (2023). *Peningkatan Pemahaman Masyarakat melalui Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional*. 3, 33–39. <https://doi.org/10.47575/apma.v3i1.376>